

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sangat kompleks dan harus mendapat penanganan yang tepat dan akurat agar dapat teratasi dengan cepat. Kepadatan penduduk di Indonesia merupakan salah satu faktor yang memicu kemiskinan. Indonesia sendiri menduduki peringkat 4 dengan penduduk terbanyak dunia pada tahun 2021 dengan sebanyak 274,9 juta jiwa. Indikator didalam sebuah kesuksesan perkembangan pembangunan sebuah negara adalah menurunnya segi angka kemiskinan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyak nya jumlah penduduk miskin, Indonesia sendiri tidak terhindar dengan masalah tersebut. Dapat dilihat dari banyak nya penduduk miskin yang ada di pedesaan yang bisa di bilang cukup sulit untuk mendapat akses atau sulit di akses. Kemiskinan adalah dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang disebabkan beberapa faktor seperti rendahnya rendhnya Tingkat pendapatan yang diperoleh adalah faktor penting yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi dan kualitas sumber daya manusia, seperti yang tercermin dalam kualitas hidup yang lebih rendah atau indeks pengembangan manusia (HDI), juga memainkan peran.

Gunawan (2000) mengkategorikan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan menjadi dua kelompok. Pertama, kemiskinan dapat dikaitkan dengan faktor eksternal atau faktor yang berada di luar kendali individu. Kondisi individu yang diklasifikasikan sebagai miskin dapat ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan yang memenuhi standar hidup. (Nugroho, 1995). Kedua, standar hidup dalam masyarakat tidak hanya harus mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tetapi juga termasuk akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan. Perumahan atau pemukiman yang memadai juga dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu. Berdasarkan kondisi ini, sebuah masyarakat dianggap miskin ketika tingkat pendapatannya jauh di bawah rata-rata, membatasi peluang kemakmuran.

Kemiskinan terus berlanjut sebagai tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Menandatangani dan menyetujui Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) pada bulan Oktober 2000 menandai komitmen global dari pemerintah Indonesia dan 188 negara lainnya untuk mengatasi berbagai masalah. Masalah-masalah ini termasuk pengurangan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan ibu dan anak-anak, penurunan kematian bayi, dan penyediaan pendidikan dasar. (Sukidjo, 2009).

Bahkan saat ini, kemiskinan masih menjadi masalah mendesak di hampir setiap negara, termasuk Indonesia. The Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Dokumen Hasil Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan) menyoroti tujuan penghapusan atau pengurangan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama di antara 17 Tujuan Pengembangan berkelanjutan. (SDGs). Pengurangan kemiskinan terus menjadi tema sentral dalam upaya pembangunan, dan berfungsi sebagai dasar untuk berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti keamanan pangan, pembangunan infrastruktur, akses energi, dan pariwisata, antara lain.

Jawa barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia turut berkomitmen dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada supaya tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDG's), terutama masalah kemiskinan yang menjadi prioritas utama. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan memperbaiki kemiskinan yang ada. Angka kemiskinan di Jawa Barat menurut BPS pada tahun 2022 mencapai 4,07 juta jiwa, dibandingkan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 66,10 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 8,06 persen meningkat 0,09 persen pada tahun 2021. Apalagi dengan adanya pandemi yang melanda Covid-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia yang tentu berdampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan penduduk baik secara tidak langsung maupun langsung. Akibat pandemi yang melanda Indonesia dan dunia mengakibatkan perekonomian di Indonesia maupun dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mengakibatkan kesejahteraan terhadap penduduk tidak dapat terpenuhi dan mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Jika berdasarkan daerah tempat tinggal jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 40,69 ribu orang pada tahun 2021 dan 2022. Hal sama juga terjadi di pedesaan mengalami penurunan sebesar 83,67 ribu orang. Di perkotaan persentase penduduk miskin turun dari 7,82 persen menjadi 7,57 persen pada tahun 2022. Sementara itu di pedesaan juga mengalami penurunan dari 10,46 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 9,88 persen pada maret 2022. Jika dilihat dari tahun 2021 ke tahun 2022 untuk perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Didalam perkembangan keuangan tidak terlepas dari pengalaman itu sendiri dan Yogyakarta. Bisa dibilang pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa hanya dirasakan oleh golongan masyarakat-masyarakat tertentu, tidak merata ke semua aspek masyarakat. Kemiskinan di Indonesia terbanyak masih di daerah pedesaan, akan tetapi di daerah perkotaan pun tidak luput dari kemiskinan. Menurut BPS (Badan pusat statistik) kemiskinan yang terjadi yaitu Jawa Timur serta Jawa Barat dan Yogyakarta.

dan Yogyakarta. Bisa dibilang pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa hanya dirasakan oleh golongan masyarakat-masyarakat tertentu, tidak merata ke semua aspek masyarakat. Kemiskinan di Indonesia terbanyak masih di daerah pedesaan, akan tetapi di daerah perkotaan pun tidak luput dari kemiskinan.

Pengukuran terhadap kemiskinan dipercaya bisa menjadi instrumen tangguh bagi pembuat kebijakan agar memfokuskan perhatian pada kondisi masyarakat miskin. Menurut Haughton dan Khandker (2009) ada empat alasan untuk mengukur kemiskinan yaitu :

1. Merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuat kebijakan pada kehidupan orang miskin.
2. Mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat.
3. Memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin.
4. Mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin.

Tabel 1.1

Persentase penduduk miskin di pulau Jawa tahun 2017-2021

Provinsi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	3.78	3.55	3.42	4.69	4.67
Jawa Barat	7.83	7.25	6.82	8.43	7.97
Jawa Tengah	12.23	11.19	10.58	11.84	11.25
Jawa Timur	11.20	10.85	10.20	11.46	10.59
DI Yogyakarta	12.36	11.81	11,44	12.80	11.91
Banten	5.59	5.25	4.94	6.63	6.50

Sumber :Badan Pusat Statistik (data diolah)

Didalam tabel 1.1 menjelaskan fluktuatif rata rata penduduk kemiskinan di kepulauan jawa yang menunjukkan naik dan turunnya penduduk miskin, ada beberapa faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi tingkat kemiskinan di pulau Jawa diantaranya tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia. Pada tahun 2021 provinsi DI Yogyakarta menempati urutan pertama jumlah persentase penduduk miskin sebesar 11,91. Sedangkan untuk provinsi Jawa Barat sendiri pada tahun 2020 tingkat persentase penduduk miskin sebesar 8,43, jika dibandingkan dengan tahun sesudahnya pada tahun 2021 tingkat persentase penduduk miskin di provinsi Jawa Barat mengalami penurunan menjadi 7,97.

Selain itu, kemiskinan adalah masalah multi-faceted yang mempengaruhi banyak aspek keberadaan manusia. Ini adalah hasil dari kemampuan manusia yang terbatas untuk menyediakan kebutuhan dasarnya, yang mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya penting dan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar menyebabkan kemiskinan. Farhan (2015).

Tingkat dalam kemiskinan di Jawa Barat pada kurun waktu 2017-2019 berangsur mengalami penurunan tiap tahunnya, namun mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat mengalami kenaikan menjadi 8,43 pada tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2021 berikutnya mengalami

penurunan menjadi 7,97, Kenaikan pada tahun 2020 dipicu dengan adanya pandemi Covid-19.

Ekspansi ekonomi populasi juga dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pengangguran karena ketika populasi tumbuh, jumlah pekerja dan tenaga kerja juga. Di negara-negara berkembang khususnya, tingkat ekspansi populasi yang lebih tinggi (termasuk pertumbuhan tenaga kerja) daripada tingkat pertumbuhan pekerjaan akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, jika tenaga kerja tidak diimbangi dengan pekerjaan yang cukup, tingkat pengangguran tinggi akan meningkat. Karena ini, sebagian dari tenaga kerja mungkin merasa sulit untuk menemukan pekerjaan; jika ini tidak dikompensasi oleh pekerjaan lain yang cocok untuk mereka, mereka akan menjadi pengangguran, yang akan meningkatkan tingkat penganggur.

Kondisi ketenagakerjaan berdampak negatif dengan adanya pandemi Covid-19. Kegiatan ekonomi dan sosial yang dilakukan agar bisa menghambat penyebaran Covid-19 di Indonesia mengakibatkan kontraksi pada beberapa sektor ekonomi. Dampaknya sangat jelas terhadap tenaga kerja yang mana terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan tenaga kerja (PHK).

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa 2017-2021 (persen)

Provinsi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	7.14	6.65	6.54	10.95	8.50
Jawa Barat	8.22	8.23	8.04	10.46	9.82
Jawa Tengah	4.57	4.47	4.44	6.48	5.95
DI Yogyakarta	3.02	3.37	3.18	4.57	4.56
Jawa Timur	4.00	3.91	3.82	5.84	5.74
Banten	9.28	8.47	8.11	10.64	8.98

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Selama lima tahun terakhir jumlah pengangguran di pulau Jawa mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada tahun 2020 semua provinsi di pulau Jawa mengalami kenaikan yang cukup besar dikarenakan adanya pandemi Covid-19. DKI Jakarta menjadi tingkat pertama dengan tingkat pengangguran sebesar 10,95 persen. Pada akhirnya di tahun 2021 jumlah tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan manusia adalah proses peningkatan pilihan masyarakat. Pilihan manusia luas dan selalu berubah, dalam teori. Namun, ada tiga pilihan yang paling fundamental di tingkat pembangunan: memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik, memperoleh pendidikan, dan menjalani hidup yang panjang dan sehat. Tiga faktor ini saja tidak membentuk pertumbuhan manusia. Pilihan tambahan untuk pertumbuhan manusia termasuk kebebasan sosial, politik, dan ekonomi untuk memungkinkan kemungkinan kreativitas dan produktivitas, serta jaminan hak asasi manusia dan harga diri. (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pembangunan kualitas hidup manusia di Jawa Barat mengalami kemajuan, dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang semakin meningkat di provinsi Jawa Barat selama periode 2010 sampai 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat dari tahun 2010 dari 66,15 meningkat menjadi 72,45 pada tahun 2021. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM Jawa Barat sebesar 0,83 persen per tahun. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat memperlihatkan kemajuan yang cukup pesat pada periode 2010 sampai 2021, dilihat dari peningkatan status pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat.

Tinggi rendahnya suatu nilai Indeks Pembangunan Manusia tidak luput dari program pembangunan pemerintah baik pada tingkat pusat ataupun daerah. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia tidak terjadi begitu saja akan tetapi melalui sebuah proses bertahap yang membutuhkan waktu cukup panjang. Oleh sebab itu program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan harus dipantau terus pelaksanaannya supaya lebih terarah.

Tabel 1.3

Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa 2017-2021

Provinsi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	80.06	80.47	80.76	80.77	81.11
Jawa Barat	70.69	71.30	72.03	72.09	72.45
Jawa Tengah	70.52	71.12	71.73	71.87	72.16
DI Yogyakarta	78.89	79.53	79.99	79.97	80.22
Jawa Timur	70.27	70.77	71.50	71.71	72.14
Banten	71.42	71.95	72.44	72.45	72.72

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dalam pembangunan dari segi manusia mengalami peningkatan yang signifikan dari tiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan perkembangan yang semakin baik pada setiap tahunnya, dilihat dari periode 2017 sampai tahun 2021 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Indeks Pembangunan Manusia provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 dari 70,69 meningkat menjadi 72,45 pada tahun 2021. Dilihat pada data di atas Provinsi Jawa Barat sendiri menempati urutan ke tiga pada tahun 2021, secara umum perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat semakin membaik. Selama lima tahun terakhir perkembangan pembangunan manusia di pulau Jawa tidak mengalami penurunan, malah sebaliknya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan IPM yang cukup besar dari lima tahun terakhir, yang mana berimbas pada meningkatnya status pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat sendiri, begitupun pada Provinsi-Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Dengan demikian apabila semakin tinggi atau bagus kualitas pembangunan manusia juga akan membantu menurunkan angka kemiskinan atau malah sebaliknya.

Penulis tertarik untuk meneliti variabel yang diyakini mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia, di sembilan kota Jawa Barat antara 2017 dan 2021, berdasarkan informasi dan deskripsi yang diberikan di atas.

B. Perumusan Masalah

Kemiskinan di negara-negara berkembang merupakan masalah yang sampai sekarang yang menjadi urgent permasalahan dalam kasus ini adalah laju terkait pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan masih sering terjadi sebagai topik utama yang menjadi di tangani. Indonesia sendiri sampai sekarang masih mencari solusi bagaimana caranya agar kemiskinan dapat di tanggulangi dan begitupun provinsi lainnya termasuk provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 9 Kota di Jawa Barat ?

C. Pembatasan Masalah

Studi ini menggunakan analisis data panel dari 2017 hingga 2021 untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di sembilan kota Jawa Barat, dengan tingkat pengangguran dan HDI berfungsi sebagai variabel independen..

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan studi ini adalah untuk menentukan pengaruh tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat kemiskinan di sembilan kota Jawa Barat, berdasarkan deskripsi latar belakang dan formulasi masalah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan dari penelitian ini, menurut penulis, adalah untuk lebih memahami variabel dan perbedaan yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selanjutnya, penyelesaian kursus ini diperlukan untuk masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, secara khusus untuk Ekonomi Pembangunan.
2. Untuk menemukan apa yang menyebabkan kemiskinan dan bagaimana untuk mengatasi hal itu, pembuat kebijakan berharap bahwa penelitian ini akan

menawarkan beberapa informasi yang berguna tentang bagaimana memahami elemen apa yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan..

3. Diperkirakan bahwa populasi umum akan menggunakannya sebagai sumber pengetahuan ekonomi untuk memahami variabel apa pun yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, khususnya di kota-kota terbesar di Jawa Barat.
4. Penulis juga berharap untuk memberikan kontribusi teoritis untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Pembangunan, dan untuk berfungsi sebagai sumber daya untuk studi masa depan yang berkaitan dengan kemiskinan..

